

PEMETAAN KETAHANAN PANGAN REGIONAL DI JAWA TIMUR

Sugeng Raharto

Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Jember

Email: raharto.faperta@unej.ac.id

ABSTRACT

The problem of food security in Indonesia is exacerbated by the high number of poverty in Indonesia. This is exacerbated by the high dependence of the Indonesian rice consumption has increased and the national rice production has decreased. The research objective is to map the village level food security based on the aspects of availability, aspects of food access and livelihoods and access to nutritional health. Methods of determining district purposively sample while the determination of villages using a Multistage Sampling. The study was conducted in Sidoarjo Regency as a regional industrial center, Jember regency as agricultural centers and Banyuwangi Regency as fishery centers.

Results obtained from this study are: (1) The villages in Sidoarjo regency 60% in the category of food resistant, and 40% in the category of food insecurity. (2) The villages in Jember regency 57% in the category of food resistant and 43% in the category of food insecurity. (3) Villages Banyuwangi 72% in the category of food resistant and 28% in the category of food insecurity.

Key words: mapping, regional, hold food, food security.

I. PENDAHULUAN

World Bank (1993) mengindikasikan bahwa ketahanan pangan dapat dicapai hanya jika rumah tangga mempunyai kemampuan untuk membeli pangan. Dengan menggunakan ukuran jumlah konsumsi dan mutu gizi pangan yang rendah dapat sebagai ukuran tidak tahan pangan (*food insecurity*), yaitu sekitar 40 % rumah tangga tergolong tidak tahan pangan. Memaknai historis konsep ketahanan pangan sampai pada Undang-Undang Pangan Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Indonesia memasukkan aspek keamanan, mutu, dan keragaman sebagai kondisi yang harus terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara cukup, merata dan terjangkau. Konferensi DKP Nasional 2004 juga memfokuskan program ketahanan pangan melalui gerakan *Mewujudkan Ketahanan Pangan Wilayah dan Nasional Melalui Pengembangan Desa Mandiri Pangan* (Hardinsyah, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan berbunyi "ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang

cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau", Desa Mandiri Pangan, sebagai realisasi program lebih difokuskan pada indikator ketahanan pangan rumah tangga dan individu anggota rumah tangga (Hardinsyah, 1998).

Menurut data dari BPS di Indonesia saat ini masih ada lebih dari 37,1 juta penduduk miskin, akan tetapi jika dimasukkan keluarga setengah miskin atau masyarakat kurang mampu sebanyak 76,4 juta jiwa hal ini menunjukkan adanya hambatan akses terhadap pangan dan masih terdapat kesenjangan distribusi pangan maupun ketimpangan konsumsi pangan menurut kelompok sosial ekonomi dan wilayah (Kompas November, 2007). Kenyataan ini memperlihatkan bahwa meski secara nasional ketahanan pangan tidak menjadi masalah, tetapi di tingkat regional dan rumah tangga kerawanan pangan masih sering ditemui (Ariani, Salim, 2002)

Beberapa program kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah antara lain Program Inpres daerah tertinggal (IDT), Program Pembangunan Keluarga sejahtera (PKS), Program Pengentasan Kemiskinan Sektorial, Program Pengentasan Kemiskinan Di Masa Kritis, Program Ketahanan Pangan, Program Pengamanan Sosial, Program

Penciptaan Lapangan kerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN) dan lain-lain (Anonymous, 2006).

Masalah kerawanan pangan di Indonesia ini diperparah dengan tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia, padahal kelompok ini adalah yang sangat rentan terhadap kerawanan pangan. Hal ini diperparah dengan tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat Indonesia, serta populasi masyarakat di Indonesia semakin meningkat membuat konsumsi beraspun juga akan meningkat, padahal produksi beras nasional kini mengalami penurunan. Hal ini kemudian menyebabkan beras menjadi komoditi pangan yang tidak terjangkau masyarakat terutama masyarakat miskin, akibatnya banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan akses pangan terhadap beras dan membuat terjadinya defisit konsumsi. Berdasarkan data tahun 1998 menunjukkan bahwa antara 49 sampai 53 persen rumah tangga di berbagai daerah mengalami defisit energi dimana konsumsi kurang dari 70% kebutuhan energi (Pemerintah RI dan WHO, 2000 dalam Sukandar, *et al*, 2001). Dalam penelitian Latief, *et al* (2000) ditemukan bahwa pada tahun 1998 sejumlah 51,1% rumah tangga mengalami defisit konsumsi. Dari sinilah terindikasi adanya kelaparan yang merupakan salah satu tanda adanya kerawanan pangan di suatu daerah ataupun negara. Dengan adanya indikasi kerawanan pangan ini merupakan suatu tantangan bagi Indonesia, untuk mengurangi kerawanan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini dikarenakan pemantapan ketahanan pangan tidak terlepas dari penanganan kerawanan pangan, karena kerawanan pangan merupakan penyebab penting instabilitas ketahanan pangan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat regional, hal yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah melakukan penanggulangan masalah pangan di daerah tersebut. Penyelesaian masalah pangan di tingkat regional seperti di Kabupaten Malang dapat dilakukan dengan bantuan pendekatan ketiga aspek ketahanan pangan. Karena dengan pendekatan ketiga aspek ketahanan pangan tersebut, dapat diketahui aspek yang paling mempengaruhi kerawan-

an pangan suatu wilayah. Selain itu juga harus didukung dengan adanya perbaikan sehingga dapat ditentukan upaya-upaya penanggulangan kerawanan pangan yang sesuai sasaran, yang didasarkan pada penyelesaian masalah pangan (Kompas, 2007). Hal yang penting dalam penanggulangan kerawanan pangan suatu wilayah, adalah mengarahkan pada penanggulangan kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Hal ini dikarenakan berdasarkan data dari World Bank, the International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan the United Nations (UN) Centre for Human Settlements dalam M.Renkow (2000) menunjukkan bahwa 47% orang miskin di dunia tinggal di daerah desa tertinggal, 36% di daerah desa maju dan 17% di daerah perkotaan.

Menurut Simatupang (1999) ketahanan pangan global, nasional, regional, lokal dan rumah tangga serta individu merupakan suatu rangkaian hierarkis. Ketahanan pangan nasional dan regional merupakan syarat keharusan (*neccesary condition*) bagi ketahanan pangan masyarakat/rumah tangga dan individu. Sementara ketahanan pangan individu merupakan syarat kecukupan (*sufficient condition*) bagi ketahanan pangan nasional. Karena itu pembahasan masalah ketahanan pangan tidak dapat dilakukan secara parsial.

Mendasarkan pada latar belakang tersebut menarik untuk diteliti; (1) Memetakan kondisi ketahanan pangan tingkat desa antar desa sentra industri, pertanian dan sentra perikanan, (2) Bagaimanakah indek ketersediaan, akses pangan dan mata pencaharian serta indek kesehatan dan gizi antar daerah sentra industri, pertanian dan perikanan.

2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian antara lain:

1. Memetakan ketahanan pangan tingkat desa (KPDS) di kabupaten sentra industri, sentra pertanian dan sentra perikanan.
2. Menghitung indek ketersediaan, indek akses pangan dan mata pencaharian serta indek kesehatan dan gizi di kabupaten sentra industri, sentra pertanian dan kabupaten sentra perikanan.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Penentuan lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Propinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu lumbung beras di tingkat nasional, sehingga diharapkan Jawa Timur memiliki desa yang berada pada kondisi tahan pangan. Pengambilan Kabupaten sebagai sampel berdasarkan pada potensi wilayah, maka secara sengaja (*purposive*) ditentukan Kabupaten Sidoarjo sebagai sentra industri, Kabupaten Jember sentra pertanian dan Kabupaten Banyuwangi sentra perikanan.

3.2. Metode Penentuan Contoh

Penentuan desa contoh dilakukan dengan menggunakan metode Multistage Sampling. Secara sengaja (*purposive*) menentukan kabupaten contoh sebagai sentra industri, pertanian dan sentra perikanan.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data yang pertama dilakukan adalah analisis faktor untuk mencari indikator ketahanan pangan tingkat desa. Analisis ini menggunakan pendekatan statistik yaitu analisis faktor dengan PCA (*Principle Component Analysis*).

Untuk mengidentifikasi ketahanan pangan regional ini berdasarkan pada indikator :

1. Akses Ketersediaan Pangan
2. Akses Pangan dan Mata Pencaharian
3. Akses Kesehatan dan Gizi

Aspek Ketersediaan Pangan

Aspek ini melihat kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pangannya sendiri. Potensi sumberdaya yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda. Ada yang menjadi sentra pangan sementara daerah yang lain menjadi sentra tanaman hortikultura, perkebunan dan lain-lain. Perbedaan potensi produksi pertanian ini tentunya sangat terkait dengan kondisi iklim dan cuaca serta kondisi tanah yang sangat spesifik pada masing-masing daerah.

Aspek ketersediaan pangan diukur dari rasio antara konsumsi pangan normatif dengan ketersediaan pangan yang dihasilkan suatu daerah (setara beras). Konsumsi pangan normatif diperoleh dengan mengasumsikan konsumsi per kapita per hari

adalah 300 gram per orang per hari. Rasio antara konsumsi pangan normatif dengan ketersediaan ini sekaligus merupakan ukuran yang menunjukkan proporsi dari ketersediaan yang digunakan untuk konsumsi.

Aspek Akses Pangan dan Mata Pencaharian

Suatu kegiatan ekonomi yang tinggi cenderung akan diikuti oleh peluang kerja yang tinggi pula, ini berarti pula bahwa kesempatan kerja dan peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Dengan pendapatan yang lebih baik maka akan terdapat daya beli yang lebih baik di masyarakat.

Upaya mengakses mata pencaharian yang lebih baik tentunya diperlukan adanya persyaratan pengetahuan dan skill yang baik, hal ini tercermin dari tingkat pendidikan di masyarakat yang lebih baik. Kegiatan ekonomi yang tinggi perlu dukungan faktor input, salah satu input produksi yang memberikan peluang bagi peningkatan produktivitas yang sangat potensial adalah tenaga listrik, sarana dan prasarana perhubungan serta infrastruktur pedesaan.

Wilayah dengan akses listrik dan tersebar diseluruh wilayah akan meningkatkan dinamisasi kegiatan ekonominya. Implikasi dari hal tersebut adalah berkurangnya angka kemiskinan di suatu wilayah. Demikian pula kaitannya dengan sarana perhubungan dan infrastruktur desa diperlukan sebagai syarat untuk memperlancar kegiatan ekonomi.

Aspek Kesehatan dan Gizi

Penyerapan pangan sebenarnya indikator dampak dari ketersediaan maupun akses pangan. Akses pangan dan ketersediaan yang baik akan memberikan peluang bagi penyerapan pangan secara lebih baik. Dalam menyusun indikator ini maka aspek-aspek yang diperhatikan antara lain:

1. Fasilitas dari Layanan Kesehatan
2. Sanitasi dan Ketersediaan air
3. Pengetahuan ibu RT
4. Outcome nutrisi dan kesehatan.

Aspek tersebut sangat strategis dalam memberikan gambaran penyerapan pangan suatu wilayah. Penyerapan pangan secara implisit adalah merupakan permasalahan asupan gizi di masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pemetaan Tingkat Ketahanan Pangan Desa

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ketahanan pangan desa dari 3

kabupaten contoh, kabupaten Sidoarjo, Jember dan Banyuwangi dapat dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perolehan Indeks Ketahanan Pangan Desa di Kabupaten Contoh 2007

Kabupaten	IAKT	IAAP	IAKG	KPDS	Jumlah Desa contoh
Sidoarjo	6,741	0,387	0,091	2,406	112
Jember	0,303	0,961	0,105	0,456	59
Banyuwangi	0,246	0,731	0,287	0,421	66

Berdasarkan data Ketahanan Pangan pada Tabel 1 di atas Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang sangat rawan pangan hal ini dapat dilihat dari angka ketahanan pangan desa sebesar 2,406, sedangkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi angka ketahanan pangan yaitu 0,456 dan 0,421 berarti lebih kecil dari Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya indeks ketersediaan kabupaten Sidoarjo menunjukkan nilai sebesar 6,47, sedangkan kabupaten contoh lainnya kabupaten Jember 0,303 dan kabupaten Banyuwangi sebesar 0,246 hal ini memperlihatkan bahwa kabupaten Sidoarjo dari indek ketersediaan berada pada kategori rawan pangan. Tingginya nilai indeks ketersediaan ini salah satu factor yang menentukan adalah produksi tanaman pangan yang dihasilkan dari daerah tersebut. Jika melihat angka indeks akses pangan dan mata pencaharian, kabupaten Sidoarjo sebesar 0,387 berarti pada kategori tahan pangan, untuk kabupaten Jember 0,961 dan kabupaten Banyuwangi 0,731 termasuk kategori rawan pangan. Kemudian indek akses kesehatan dan Gizi kabupaten Sidoarjo 0,091 dan kabupaten Jember 0,105 berarti kedua

kabupaten tersebut termasuk kategori sangat tahan pangan, kabupaten Jember sebesar 0,287 termasuk daerah tahan pangan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari angka indek akses pangan dan kesehatan dan gizi rata-rata desa di kabupaten Sidoarjo termasuk kreteria tahan pangan, sedangkan rata-rata desa di kabupaten Jember rawan pangan dan tahan pangan, untuk rata-rata desa di kabupaten Banyuwangi berada pada rawan pangan dan tahan pangan. Mengapa kabupaten Sidoarjo dari indek akses pangan dan kesehatan dan gizi berada pada kreteria tahan pangan, hal ini disebabkan kabupaten Sidoarjo merupakan daerah industri, banyak masyarakat yang bekerja pada sektor industri dimana upah atau pendapatan yang diterima para pekerja lebih tinggi dan kontinyu dibandingkan untuk tanaman pangan maupun daerah perikanan ada musim paceklik dan hal ini berdampak pada pendapatan masyarakat.

Sedangkan untuk melihat persentase jumlah desa berdasarkan tingkat kerawanan pangan dari ke 3 kabupaten contoh berdasarkan data dari Tabel 1, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Desa Berdasarkan Tingkat Kerawanan Pangan 2007

Kabupaten	Sangat Tahan (%)	Tahan (%)	Cukup Tahan (%)	Agak Rawan (%)	Rawan (%)	Sangat Rawan (%)	Jumlah Desa contoh
Sidoarjo	13,39	41,07	0	5,35	7,14	33,03	112
Jember	8,47	49,15	0	15,25	13,55	13,55	59
Banyuwangi	0	71,21	0	21,21	6,06	1,51	66

Berdasarkan data Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa di kabupaten Sidoardjo jumlah desa yang termasuk kriteria rawan pangan sebanyak 40,17%, sedangkan desa yang termasuk kriteria desa sangat pangan dan tahan pangan sebesar 54,46 % dari jumlah desa contoh 112 desa. Kabupaten Jember jumlah desa rawan pangan 27,10 %, dan jumlah desa tahan pangan 57,62% dari jumlah desa contoh sebanyak 59 desa. Kemudian kabupaten Banyuwangi jumlah desa rawan pangan 7,57 % dan jumlah desa tahan pangan 71,21 % dari jumlah desa contoh 66 desa. Jika melihat dari jumlah desa contoh dan mendasarkan pada kriteria ketahanan pangan, misalnya jumlah desa rawan pangan di kabupaten Sidoardjo sebanyak 40,17 % akan tetapi dari jumlah contoh sebanyak 112 desa, maka jumlah persentase desa rawan pangan di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan kecil desa rawan pangannya dibandingkan 2 kabupaten contoh yaitu kabupaten Jember 59 desa dan kabupaten Banyuwangi sebanyak 66 desa. Sebenarnya jumlah kecamatan contoh yang diambil untuk setiap kabupaten sama yaitu 6 kecamatan, tetapi jumlah desa setiap kecamatan antar kabupaten tidak sama dan kabupaten Sidoardjo setiap kecamatan jumlah desanya lebih banyak dibandingkan kabupaten Jember dan kabupaten Banyuwangi.

Apabila tidak dikaitkan dengan jumlah desa contoh, maka kabupaten Banyuwangi jumlah desa yang tahan pangan lebih besar sebanyak 71,21 %, kemudian diikuti kabupaten Jember sebanyak 57,62%. Untuk jumlah desa rawan pangan jika tidak melihat jumlah desa contoh maka kabupaten Sidoardjo memiliki desa rawan pangan lebih besar dari kabupaten Jember dan kabupaten Banyuwangi sebanyak 40,17 %, dan jumlah desa yang termasuk sangat rawan pangan yang paling kecil yaitu kabupaten Banyuwangi sebanyak 7,57 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan di kabupaten Sidoardjo desa dengan kriteria tahan pangan ada 54,46 %, maka daerah ini dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya lebih dari 50% dengan jumlah desa contoh sebanyak 112 desa,

apabila dilihat dari jumlah desa contoh jumlah desa yang tahan pangan di kabupaten Sidoardjo lebih banyak dibandingkan 2 kabupaten lainnya, karena jumlah desa contoh di kabupaten Jember sebanyak 59 desa dan kabupaten Banyuwangi jumlah desa contoh 66 desa, sisanya tidak dapat dipenuhi dari produksi daerah tersebut dan kekurangan jumlah pangan ini dapat diimpor dari kabupaten sekitarnya. Kabupaten Jember desa tahan pangan ada 58 %, berarti daerah ini dapat mencukupi kebutuhan pangan hanya 58 % dari total desa sebanyak 59 desa, sisanya tidak dapat terpenuhi dari produksi pangan daerah tersebut. Kabupaten Banyuwangi desa yang termasuk kriteria tahan pangan 71 %, berarti daerah ini dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya sekitar 71 % dari total desa sebanyak 66 desa, dan sisanya tidak dipenuhi dari produksi daerah tersebut.

Akan tetapi jika tidak dikaitkan dengan jumlah desa contoh, maka kabupaten Banyuwangi jumlah desa yang tahan pangan lebih besar sebanyak 71,21 %, kemudian diikuti kabupaten Jember sebanyak 57,62%. Untuk jumlah desa rawan pangan jika tidak melihat jumlah desa contoh maka kabupaten Sidoardjo memiliki desa rawan pangan lebih besar dari kabupaten Jember dan kabupaten Banyuwangi sebanyak 40,17 %, dan jumlah desa yang termasuk sangat rawan pangan yang paling kecil yaitu kabupaten Banyuwangi sebanyak 7,57 %.

4.2. Indeks Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan suatu aspek yang mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan daerahnya. Hal ini didasarkan pada potensi sumberdaya yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap daerah. Ada yang menjadi sentra tanaman pangan, sentra perikanan, sentra industri, sementara daerah lainnya merupakan daerah sentra tanaman perkebunan dan tanaman lain. Untuk mengetahui kerawanan pangan desa mendasarkan aspek ketersediaan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Kerawanan Pangan Desa Mendasarkan Pada Aspek KetersediaanTahun 2007

Kabupaten	Sangat Tahan (%)	Tahan (%)	Cukup Tahan (%)	Agak Rawan (%)	Rawan (%)	Sangat Rawan (%)	IAKT
Sidoardjo	16,96	24,10	8,92	7,14	2,67	40,17	6,741
Jember	37,28	28,81	11,86	10,16	5,08	13,55	0,303
Banyuwangi	36,36	43,93	12,12	3,03	3,03	1,51	0,246

Dari Tabel 3 di atas dapat dijelaskan dari aspek ketersediaan pangan di Kabupaten Sidoardjo angka indek ketahanan pangan sebesar 6,471 % dari jumlah desa contoh sebanyak 112, Berdasarkan angka indek ketersediaan kabupaten Sidoardjo termasuk kategori rawan pangan, artinya kebutuhan pangan masyarakat tidak dapat dipenuhi apabila mengandalkan produksi pangan dari daerah tersebut. Hal ini disebabkan produksi pangan yang dihasilkan untuk tanaman padi produktivitas 5,3 ton/hektar, produktivitas jagung 1,67 ton/ha, tanaman ubi kayu dan ubi jalar tidak dihasilkan dari daerah tersebut yang dapat dijadikan penunjang ketahanan pangan bagi masyarakat.

Selain itu kondisi diperparah kabupaten Sidoardjo banyak terdapat industri pakan ternak yang juga menyerap produksi jagung, sehingga masyarakat membutuhkan jagung sebagai campuran untuk dikonsumsi, bersaing dengan industri pakan ternak dan rata-rata jumlah penduduk per desa 4390 orang dari 112 desa contoh. Untuk kabupaten Jember mempunyai indek ketersediaan sebesar 0,303 artinya kabupaten Jember termasuk kategori tahan pangan dan hal ini ditunjang produktivitas tanaman pangan, untuk tanaman padi sebesar 5,15 ton/hektar, tanaman jagung sebesar 3,05 ton/hektar, ubi kayu sebesar 10 ton/hektar dan tanaman ubi jalar 3,6 ton/hektar. Oleh karena di Kabupaten Jember ketersediaan pangan tidak hanya tercukupi dari tanaman padi atau beras saja, tetapi juga dari tanaman lain seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar, selain itu di kabupaten Jember tidak ada industri pakan ternak, dimana industri ini permintaan jagung sebagai bahan baku cukup besar dibandingkan permintaan yang konsumsi oleh penduduk relatif kecil, dimana populasi penduduk kabupaten Jember per desa rata-rata 6.000 orang namun jumlah penduduk

yang terpadat biasanya di daerah dekat perkotaan.

Selanjutnya kabupaten Banyuwangi dilihat dari indek ketersediaan pangan 0,246, berarti kabupaten Banyuwangi termasuk kriteria tahan pangan. Hal ini ditunjang dari produktivitas tanaman pangan, dimana tanaman padi produktivitasnya 5,50 ton/hektar, tanaman jagung 4,89 ton/hektar, tanaman ubi kayu 13,59 ton/hektar dan tanaman ubi jalar 1,58 ton/hektar. Kondisi kabupaten Banyuwangi sama dengan kabupaten Jember, di kabupaten Banyuwangi tidak terdapat industri yang bahan baku dari tanaman misal jagung, maka jagung sebagai bahan pangan selain beras cukup tersedia, karena tidak bersaing dengan industri. Jumlah penduduk kabupaten Banyuwangi rata-rata per desa 7081 orang lebih padat dibandingkan kabupaten Jember, namun kebutuhan pangan masyarakat tersedia mengingat kabupaten Banyuwangi jagung, ketela pohon dan ubi jalar selain beras. Selain itu dari Tabel 3 dapat dijelaskan meskipun kabupaten Sidoardjo termasuk kategori rawan pangan berdasarkan indek ketersediaan, namun daerah ini juga mempunyai desa kriteria tahan pangan, sebesar 16,96 % desa sangat tahan pangan, 24,10 % desa tahan pangan dan 8,92 % desa cukup tahan pangan.

Selanjutnya untuk kabupaten Jember berdasarkan indek ketersediaan termasuk tahan pangan, akan tetapi kabupaten Jember masih ada desa-desa yang termasuk rawan pangan antara lain 5,08% desa yang agak rawan pangan, kemudian desa rawan pangan 5,08 % dan desa kategori sangat rawan pangan 13,55 %. Untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat daerah tersebut bisa mendatangkan dari daerah sekitarnya.

Kemudian untuk kabupaten Banyuwangi juga mempunyai desa yang termasuk kategori rawan pangan, antara lain untuk desa agak rawan pangan 3,03 %, desa

rawan pangan sebesar 3,03 % dan desa sangat rawan pangan 1,51 %. Selanjutnya dari Tabel 3 dapat disimpulkan untuk desa dengan kriteria rawan pangan kabupaten Banyuwangi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan 2 kabupaten contoh lainnya yaitu kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Jember.

4.3. Faktor Akses Pangan dan Mata Pencaharian

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi indeks akses pangan dan mata pencaharian yaitu KK miskin, KK tidak akses listrik, Buruh (tani dan swasta), KK rumah bambu, penduduk buta huruf, penduduk tidak tamat SD dan pengangguran. Artinya 7 indikator yang ada tersebut memiliki keragaman dan karakteristik yang cukup erat dalam mewakili faktor akses pangan dan mata pencaharian.

Indikator KK miskin memiliki loading faktor terbesar dibandingkan indikator lainnya. Hal ini berarti indikator KK miskin mempunyai kontribusi yang paling tinggi dalam menyusun faktor akses pangan dan mata pencaharian. Artinya, KK miskin menjadi acuan utama sebagai indikator penyebab kerawanan pangan pada akses pangan dan mata pencaharian.

Kemiskinan memang merupakan faktor utama kerawanan pangan yang sangat penting untuk diperhatikan. Kemiskinan pedesaan (rural poverty) dapat dikatakan sebagai salah satu topik yang tidak mungkin dapat dilepaskan dalam masalah pembangunan pedesaan.

Masalah kemiskinan selalu terkait satu dengan lainnya terutama terkait dengan masalah akses pangan. Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan dan tingkat kesejahteraan yang rendah, maka kecenderungan akan mengalami kekurangan pangan dan masalah akses pangan, yaitu tidak memiliki kemampuan secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh pangan yang dikaitkan dengan kemampuan memproduksi atau kemampuan membeli pangan.

Rendahnya daya beli masyarakat karena kemiskinan ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan akan pangan yang memenuhi pola pangan harapan sebagai syarat asupan gizi yang cukup, juga tidak dapat dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator KK miskin memiliki peran yang penting terhadap akses pangan dan mata pencaharian yang menjadi penyebab kerawanan pangan di wilayah pedesaan. Hasil penelitian berdasarkan aspek akses pangan dan mata pencaharian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Kerawanan Pangan Desa Berdasarkan Pada Aspek Akses Pangan dan Matapencaharian Tahun 2007

Kabupaten	Sangat Tahan (%)	Tahan (%)	Cukup Tahan (%)	Agak Rawan (%)	Rawan (%)	Sangat Rawan (%)	IAAP
Sidoarjo	8,03	64,28	7,14	3,57	7,14	16,66	0,387
Jember	0	20,33	22,03	8,47	8,47	40,67	0,961
Banyuwangi	0	1,51	7,57	28,78	39,39	22,72	0,731

Dari Tabel 4 dapat dijelaskan dari indeks akses pangan kabupaten Sidoarjo memiliki indeks terkecil yaitu 0,387 berarti termasuk kriteria tahan pangan, dibandingkan kabupaten Jember dimana indeks akses pangan sebesar 0,961 dan kabupaten Banyuwangi sebesar 0,731.

Berdasarkan indikator tersebut di atas di kabupaten Sidoarjo rata-rata per desa KK miskin sebesar 126 KK, KK yang tidak bisa akses listrik 15 KK, jumlah buruh 2498

orang, KK yang memiliki rumah bambu 28 KK, penduduk buta huruf 37 orang, penduduk yang tidak tamat SD 90 orang dan jumlah pengangguran 38 orang dari jumlah desa contoh sebanyak 112 desa. Sedangkan di kabupaten Jember rata-rata per desa jumlah KK miskin 542 KK, KK tidak akses listrik 955 KK, Sebagai buruh 75543 orang, KK rumah bambu 459 KK, jumlah penduduk buta huruf 647 orang, penduduk tidak tamat SD 1598 orang, jumlah

pengangguran 7 orang dari jumlah desa sebanyak 59 desa. Selanjutnya untuk kabupaten Banyuwangi rata-rata per desa jumlah KK miskin 524 KK, KK tidak akses listrik 45 KK, sebagai buruh 4710 orang, KK rumah bambu 114 KK, penduduk buta huruf 71 orang, KK tidak tamat SD 296 orang dan jumlah pengangguran 22 orang. Berdasarkan data tersebut salah satu indikator yang menentukan akses pangan adalah jumlah warga yang miskin, semakin banyak warga yang miskin maka tidak dapat mengakses pangan. Kabupaten Sidoarjo memiliki warga miskin yang relatif kecil dibandingkan kabupaten contoh lainnya seperti kabupaten Jember dan kabupaten Banyuwangi.

Meskipun demikian Kabupaten Jember masih memiliki desa yang tahan pangan 20,33 % dan cukup tahan 22,03 % berarti 42,36 % dari desa contoh masyarakatnya masih bisa mengakses

pangan, sedangkan sisanya masyarakat di desa contoh tidak dapat mengakses pangan. Kabupaten Banyuwangi desa tahan pangan 1,51 % dan cukup tahan pangan 7,57 % berarti 9,08 % warga dari desa contoh dapat mengakses pangan.

4.4. Akses Kesehatan dan Gizi

Indikator yang menentukan indeks akses Kesehatan dan Gizi antara lain (1) jumlah balita gizi buruk, (2) wanita buta huruf, (3) angka kematian bayi, (4) KK tidak akses air bersih, (5) prasarana kesehatan dan jumlah tenaga medis. Artinya, indikator tersebut akan berperan terhadap tingkat kesehatan dan gizi masyarakat, dan kelima indikator tersebut mempunyai kontribusi yang tinggi dalam menyusun faktor kesehatan dan gizi. Hasil penelitian dari aspek akses Kesehatan dan gizi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Kerawanan Pangan Desa Mendasarkan Pada Aspek Akses Kesehatan dan Gizi Tahun 2007

Kabupaten	Sangat Tahan (%)	Tahan (%)	Cukup Tahan (%)	Agak Rawan (%)	Rawan (%)	Sangat Rawan (%)	IAGK
Sidoarjo	72,32	18,75	8,92	0	0	0	0,091
Jember	77,96	8,92	0	0	1,69	3,38	0,105
Banyuwangi	27,27	48,48	15,15	6,06	1,51	1,51	0,287

Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa indeks akses kesehatan dan gizi, maka kabupaten Sidoarjo mempunyai angka indeks yang paling kecil yaitu 0,091 berarti kabupaten Sidoarjo termasuk kategori sangat tahan pangan, dibandingkan kabupaten Jember 0,105 dan kabupaten Banyuwangi 0,287 akan tetapi ke 2 kabupaten tersebut juga termasuk kriteria tahan pangan.

Berdasarkan indikator tersebut di atas kabupaten Sidoarjo, setiap desa mempunyai rata-rata; balita gizi buruk 3 orang, wanita buta huruf 37 orang, kematian bayi 1 orang, kepala keluarga tidak akses air bersih sebanyak 54 KK, prasarana kesehatan 1 buah dan tenaga medis 3 orang dari jumlah desa contoh sebanyak 112 desa. Sedangkan kabupaten Jember dari indikator tersebut rata-rata balita gizi buruk 17 orang, wanita

buta huruf 646 orang, kematian bayi 2 orang, kepala keluarga tidak akses air bersih sebanyak 787 KK, prasarana kesehatan 1 buah, dan tenaga medis 4 orang, dari jumlah desa contoh 59 desa. Kemudian untuk kabupaten Banyuwangi dari nilai indikator tersebut jumlah rata-rata desa; balita gizi buruk 3 bayi; wanita buta huruf 37 orang, kematian bayi 2 bayi, kepala keluarga tidak akses air bersih 54 KK, prasarana kesehatan 1 buah dan tenaga medis 3 orang dari jumlah desa contoh sebanyak 66 desa.

Berdasarkan data di atas rendahnya indeks akses kesehatan dan gizi 0,091 di kabupaten Sidoarjo, seperti rendahnya jumlah balita gizi buruk, wanita buta huruf, kematian bayi, KK tidak bisa akses air bersih, disebabkan masyarakat sudah memahami pentingnya kesehatan dan gizi di masyarakat, selain itu posisi daerah

Sidoarjo lebih dekat dengan ibu kota provinsi Jawa Timur, sehingga informasi tentang kesehatan lebih mudah diakses oleh masyarakat, dibandingkan posisi 2 kabupaten contoh lainnya yaitu kabupaten Jember dan Banyuwangi. Selain itu dari data yang ada rata-rata penduduk desa yang tidak tamat Sekolah kabupaten Sidoarjo 89 orang, kabupaten Jember 1589 orang dan kabupaten Banyuwangi 295 orang. Maka rendahnya jumlah penduduk yang tidak tamat SD di Sidoarjo sangat berpengaruh untuk mengakses pentingnya kesehatan dan gizi.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Faktor yang berperan sebagai penyebab ketahanan pangan tingkat desa adalah Faktor Ketersediaan Pangan, Faktor Akses Pangan dan Mata Pencaharian, serta Faktor Kesehatan dan Gizi yang tersusun dalam 13 indikator yaitu : KK miskin, KK tidak akses listrik, Buruh (tani dan swasta), KK rumah bambu, Penduduk buta huruf, Penduduk tidak tamat SD, Pengangguran, Jumlah balita gizi buruk, Wanita buta huruf, Angka kematian bayi, KK tidak akses air bersih, Prasarana Kesehatan dan Jumlah tenaga medis.
2. Pemetaan ketahanan pangan tingkat desa dari 3 kabupaten contoh yaitu: Kabupaten Sidoarjo terdiri dari; desa sangat tahan pangan 13,39%, tahan pangan 41,07%, cukup tahan 0%, agak rawan pangan 5,35%, desa rawan pangan 7,14% dan sangat rawan pangan 33,03%.
Kabupaten Jember terdiri dari; desa sangat tahan pangan 8,47%, desa tahan pangan 49,15%, desa cukup tahan pangan 0%, desa agak rawan pangan 15,25% , desa rawan pangan 13,55% dan sangat rawan pangan 13,55 %.
Kabupaten Banyuwangi terdiri dari; desa sangat tahan pangan 0%, desa tahan pangan 71,21%, desa agak rawan pangan 21,21%, desa rawan pangan 6,06% dan sangat rawan pangan 1,51% .
3. Berdasarkan indek ketersediaan pangan, kabupaten yang rawan pangan yaitu

kabupaten Sidoarjo, dari indek akses pangan dan mata pencaharian kabupaten Jember, sedangkan dari indek akses kesehatan dan gizi kabupaten yang rawan pangan Kabupaten Banyuwangi.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Pendekatan yang perlu diusulkan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan adalah kebijakan pada tingkat yang lebih mikro yaitu ketahanan pangan tingkat desa dan tingkat rumah tangga dengan mengacu pada kebijakan yang mendasarkan pada faktor ketersediaan, faktor akses pangan dan mata pencaharian serta faktor kesehatan dan gizi.
2. Perlunya pendekatan sampai pada ketahanan pangan rumah tangga untuk dapat mengetahui keseluruhan faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga dan individu. Oleh karena itu kebijakan ketahanan pangan nasional mendasarkan juga pada ketahanan pangan rumah tangga dan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amang, B dan Silitonga C, 1989. *Kebijakan Harga, Subsidi, Diversifikasi Produksi dan Konsumsi Pangan*. Makalah Disampaikan pada Konferensi Nasional IX Perhepi. Jakarta.
- Amang, B. 1995. *Sistem Pangan Nasional*. PT. Dharma Karsa Utama. Jakarta.
- Anderson, SE., 1998. Care Indicators of Nutritional State for Difficult-to-Sample Population. *Journal of Nutrition* 120.
- Ariani, M. Dan Saliem, H.P., 2002. *Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 20 No. 1*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan

- Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Baliwati, Y.F. 2001. *Model Evaluasi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani (Desa Sukajadi Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor)*. Disertasi. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- FAO, 1995. *Food Security Assesment* (Document WFS 96/Tech/7). Rome
- FAO, 1997. *Assesment of The Household Food Security Situation Based on The Agregate Household Security Index and The Sixth World Food Survey*. Commitee on World Food Security. Tweenty-Third Session. Rome.
- Fox, J.J., 1997. *Harvest of The Palm : Ecological Change in Eastern Indonesia*. Harvard University Press. Cambride. England.
- Gittinger, J.P., I. Leslie, and C. Hoisington, 1987. *Food Policy, Integrating Supply, Distribution and Consumption*. The John Hopkins University Press. Baltimore.
- Hardinsyah, Y.F. Baliwati, D. Martianto, H.S. Rahman, A. Widodo dan Subiyakto, 2001. *Pengembangan Konsumsi Pangan dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan*. Kerjasama antara Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi Lembaga penelitian Institut Pertanian Bogor dengan Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen pertanian. Jakarta.
- Hermanto dan Andriati, 1986. *Struktur Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Timur*, dalam Proceeding Hasil Seminar Patanas ke 2 di Bogor 19 – 20 Desember 1985. Pusat penelitian Agroekonomi, Deptan, Bogor.
- Hoddinot, J, 2001. *Methodes For Rural Development Project*. International Food Policy research Institute Washington, DC
- Hussein. S.M. 2000. *Ketahanan Pangan Dalam Liberalisasi Perdagangan*. Makalah Seminar Perhepi. 12 – 14 Februari 2000. Jakarta.
- [Http://www.theceli.com/dokumen/produk/1996/uu7-1996.htm](http://www.theceli.com/dokumen/produk/1996/uu7-1996.htm)
- [Http://www.thecelli.com/dokumen/produk/2006/uu7-2006](http://www.thecelli.com/dokumen/produk/2006/uu7-2006)
- Khomsan, Ali. 1999. *Indikator Ketahanan Pangan di Jawa*. Media Gizi & Keluarga, XXIII (1): 60-68.
- Muhilal, Fasli Jalal dan Hardinsyah. 1998. *Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan*. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Nindyowati, E., 2001. *Rencana Induk Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur 2001 – 2004*. Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Nuhfil, H. 2002 . *Analisis Harga Pangan di Jawa Timur*. Makalah Seminar Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur. 4 – 5 Nopember 2002 . Batu Malang. Jawa Timur.
- Obied, A. E., Stanley R. Johnson, Helen H. Jensen and Lisa C. Smith. 1999. *Food Security*. New Solutions for the Twenty-first Century. Iowa State University Press/Ames
- Pakpahan A., H.P. Saliem, S.H. Suhartini dan N. Syafaat, 1993. *Penelitian tentang Ketahanan Pangan Masyarakat Berpendapatan rendah*. Monograph Series No. 14. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 2001. *Pendataan Kemiskinan Dengan*

- Indikator Baru Jawa Timur 2001.* Surabaya.
- Roedjito, D. 1987. *Sinopsis dan Suntingan Perencanaan Gizi.* PT. Media Sarana, Jakarta.
- Sen. A. 1981. *Poverty and Famine : An Eassy on Entitlement and Deprivation.* Oxford University Press, Oxford.
- Shonkwiler, J.S, J. Lee, T.G. Taylor, 1987. *An Empirical Model of The Demand for Varied Diet.* Applied Economics.
- Suhardjo, 1998. *Konsep dan Kebijakan Diversifikasi Konsumsi Pangan dalam rangka Ketahanan pangan.* Makalah Disampaikan pada Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, 17 – 20 Pebruari 1998. Jakarta.
- Suhardjo dan Hardinsyah, 1989. *Food Consumption and Asvailability in Five Provinces of Jawa Island.* Media Gizi dan Keluarga. Jurusan Gizi dan Sumberdaya Keluarga. Fakultas Pertanian Bogor. Bogor.
- Sumarwan, Ujang dan Dadang Sukandar. 1998. *Analisis Ketahanan Pangan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga.* Media Gizi dan Keluarga. XXII (1).
- World Bank, 1986. *Poverty ang Hunger : Issues and Options for Food Security in Developing Countries.* World Bank Policy Study. Washington DC.